

Motif Intervensi Arab Saudi Terhadap Perang Saudara di Yaman

Sigit Priambodo

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: sigitpriambodo2121@gmail.com

Abstract

This study explains the motive behind the intervention of Saudi Arabia to Yemen. The ongoing conflict in Yemen is so complex as to make the foreign parties to engage in it, namely Saudi Arabia, which is one of the outsiders were involved in internal Yemeni conflicts. Conditions Yemen country is now the world's attention, this is because the air attacks Arab states led by Saudi Arabia to Yemen to dispel the Houthi Shia militia who seized and occupied the official Yemeni government under President Abd-Rabbu Mansour Hadi. In March 2015, Saudi Arabia launched massive military attack in Yemen to fight the Shiite Houthi rebels. Saudi Arabia is deploying some 100 combat aircraft and 150 thousand troops to this military operation, which aims to resolve the ongoing conflict in Yemen and prevent the rebels Houthi use of airports and aircraft to attack the city of Aden and parts of Yemen others and prevent them from using rockets for control of areas of Yemen. In this case there are several underlying reasons which prompted the authors to set title Military Intervention Saudi Arabia in the conflict in Yemen in 2015, namely because historically Countries often intervene in a conflict in the Middle East are the United States, but in the ongoing conflict in Yemen in 2015, this conflict is very thick indeed hostile Sunni-Shiite power. But behind it, there is something that makes Saudi Arabia should do to dispel attacks on Yemeni Houthi militias. This is the reason for the authors analyze what interests or motives Saudi Arabia to intervene in the conflict in Yemen in 2015.

Keywords: Conflict, Intervention, Civil War, National Interest, Motive.

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan Motif di balik intervensi Arab Saudi terhadap Yaman. Konflik yang sedang terjadi di Yaman saat ini sedemikian rumitnya sehingga membuat pihak asing untuk terlibat didalamnya, yakni Arab Saudi yang merupakan salah satu pihak luar yang ikut terlibat dalam konflik internal Yaman. Kondisi negeri Yaman kini menjadi sorotan dunia, hal ini karena serangan udara negara-negara Arab yang dipimpin Arab Saudi terhadap Yaman untuk menghalau milisi Syiah Houthi yang merampas dan menduduki pemerintahan resmi Yaman di bawah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Pada Maret 2015, Arab Saudi melancarkan serangan militer besar-besaran di Yaman untuk memberantas para pemberontak Syiah Houthi. Arab Saudi mengerahkan 100 pesawat tempur dan 150 ribu tentara untuk operasi militer ini, yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi di Yaman serta mencegah para pemberontak Houthi menggunakan bandara-bandara dan pesawat untuk menyerang kota Aden dan bagian-bagian Yaman lainnya serta mencegah mereka menggunakan roket-roket untuk menguasai wilayah-wilayah Yaman. Dalam kasus ini ada beberapa alasan pokok yang mendorong penulis untuk menetapkan judul Intervensi Militer Arab Saudi dalam Konflik di Yaman Tahun 2015, yaitu karena secara historis Negara yang sering melakukan intervensi terhadap suatu konflik yang terjadi di Timur Tengah adalah Amerika Serikat, tetapi dalam konflik yang berlangsung di Yaman tahun 2015, Konflik ini sangat kental memang perseteruan kekuasaan Sunni-Syiah. Namun dibalik itu, ada sesuatu yang membuat Arab Saudi harus melakukan serangan ke Yaman untuk menghalau milisi Houthi. Hal tersebut menjadi alasan untuk penulis menganalisis apa kepentingan atau motif Arab Saudi dengan melakukan intervensi dalam konflik yang terjadi di Yaman tahun 2015.

Kata Kunci: *Konflik, Intervensi, Perang Saudara, Kepentingan Nasional, Motif.*

Dalam beberapa bulan terakhir ini telah terjadi konflik yang melibatkan beberapa kelompok di Yaman, konflik yang menyebabkan terjadinya “perang saudara” di Yaman. Pemerintah Yaman yang notabene ialah di kuasai oleh mayoritas kaum Sunni ini terlibat konflik dengan kaum Syiah yang dimana menjadi pemberontak pada kasus ini, presiden kala itu adalah Abdrabbuh Mansour Hadi, sedangkan kaum pemberontak pemerintahan saat itu ialah kaum Syiah yang dikenal juga sebagai Huthi.

Pasukan keamanan Yaman terbagi menjadi dua, dengan sebagian membela kaum Sunni yang dimana menjadi poros pemerintahan utama pada saat itu, dan lain nya bergabung kepada pemberontak Huthi yang notabene ialah kaum Syiah. Presiden saat itu Mansour Hadi banyak didukung di Yaman selatan, yang dimana memang menjadi basis kekuatan Islam Sunni dan pusat pemerintahan Yaman kala itu.

Pesatnya perkembangan wilayah pemberontak Houthi di Yaman Barat serta pendudukan ibu kota Yaman, Sana’a, pada bulan September menarik perhatian pemain-pemain regional besar yang berkepentingan menjaga stabilitas Yaman dan akses ke perairan Bab El-Mandeb.

Mesir merupakan salah satu pemain tersebut. Karena Mesir menguasai Terusan Suez, politikus Amr Moussa dikutip oleh surat kabar Al Ahram bahwa pemerintah Mesir memutuskan mendukung koalisi Arab pimpinan Saudi menyerang Houthi agar akses ke Laut Merah yang berujung di Terusan Suez tetap aman. Selain itu, dukungan keuangan yang sangat besar dari negara-negara Arab di Teluk Persia untuk Mesir pasca-Hosni Mubarak memaksa Mesir untuk menepati janjinya sebisa mungkin—kali ini berupa bantuan militer untuk koalisi anti-Houthi.

Negara-negara ini sangat bergantung pada jargon “hentikan ekspansionisme Iran” sebagai alasan kampanye pengeboman terhadap “milisi yang didukung Iran”.

Gerakan Houthi—namanya diambil dari nama pendirinya, Hussein Al-Houthi—didirikan pada tahun 2004 di provinsi Saada, Yaman utara. Saada sejak dulu merupakan wilayah terbelakang yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Tidak adanya sarana penting seperti air dan listrik semakin memperkuat rasa keterasingan sekte Zaidi selaku penduduk mayoritas di sana. Gerakan Houthi awalnya didirikan untuk memperjuangkan hak-hak asasi kaum Zaidi (karena mereka tergolong minoritas di Yaman) serta menyediakan layanan pendidikan dan sosial di Saada.

Hussein Al-Houthi tewas pada tahun 2004 saat pasukan keamanan pemerintah Yaman hendak menangkapnya. Selama enam tahun berikutnya, pemberontak Houthi terlibat dalam perang sipil melawan pemerintahan di Sana’a. Setelah ayahnya meninggal tahun 2005, putra Al-Houthi, Abdel-Malek, memimpin gerakan ini dan merintis kampanye gerilya yang terpusat di pegunungan batu Saada. Konflik ini mengakibatkan ratusan ribu warga sipil kehilangan tempat tinggal. Konflik ini mulai reda setelah gencatan senjata tahun 2010.

Sejak Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mensponsori kesepakatan yang menggulingkan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dari tampuk kekuasaan dan menggantinya dengan mantan wakilnya, Abd Rabbu Mansour Hadi, pada awal 2012, Yaman belum merasakan kestabilan yang diharapkan dulu. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk bercokolnya Al Qaeda di Yaman selatan, ekonomi yang bobrok, dan berbagai kelompok politik yang tidak puas dengan

gagalnya Konferensi Dialog Nasional Yaman tahun 2013.

Banyak analis dan pengamat Yaman yang melihat campur tangan mantan presiden Saleh dalam cepatnya laju perkembangan Houthi. Sejumlah anggota keluarga dekat Saleh menempati posisi-posisi penting di militer Yaman dan partainya, Kongres Rakyat Umum. Dari rumahnya di Sana'a, Saleh—secara teknis keluar dari dunia politik dan diduga memiliki kekayaan miliaran dolar—masih rajin menemui kepala suku dan tokoh politik layaknya seolah-olah ia masih menjabat presiden. Sejak ia dipaksa menyerahkan kekuasaannya pada tahun 2012, Saleh mencoba menghambat transisi ke demokrasi yang dipimpin oleh mantan wakilnya, Hadi.

Ketika Houthi menduduki Sana'a tanpa perlawanan bulan September, jelas sekali bahwa Saleh memanfaatkan pengaruhnya di militer untuk mempersilakan mereka masuk dan menggulingkan Hadi dari kursi kepresidenan. "Ali Abdullah Saleh ingin memberantas lawannya agar ia bisa kembali menjadi pemimpin bangsa, dan Houthi dimanfaatkan sebagai jalan mencapai tujuan tersebut," kata Saeed al-Airi, anggota partai Islamis Yaman, al-Islah, kepada BBC.

Keberhasilan Houthi menembus pusat-pusat kota besar di Yaman sering dinilai sebagai efek pendanaan, pasokan senjata, atau pelatihan yang diberikan rekan sesektenya di Iran. Akan tetapi, tidak tepat bila konflik ini digambarkan sebagai perang proksi Sunni-Syiah semata antara Arab Saudi dan Iran.

Pada Januari 2015, ketika pemberontak berhasil mengambil alih pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Hadi, Arab Saudi memimpin sebuah misi intervensi yang didalamnya terlibat beberapa negara semenanjung arab seperti Jordania, Mesir, Maroko, dan Sudan. Disini pasukan koalisi tersebut melancarkan serangan udara terhadap Huthi yang telah menguasai beberapa wilayah di Yaman. Koalisi tersebut secara langsung diminta oleh

presiden Yaman ketika itu yaitu presiden Hadi untuk melakukan intervensi kedalam negara yaman atas nama "kemanusiaan", dengan menamakan operasi nya dengan nama "Decisive Storm", koalisi yang dipimpin Saudi Arabia disini negara yang mayoritas nya adalah kaum Islam Sunni.

Secara geografis kawasan Timur Tengah berbatasan dengan tujuh lautan yang strategis, yaitu Laut Tengah (Mediterrania) terletak di perbatasan antara Mesir, Libya dan Tunisia; Laut Merah terletak di perbatasan antara Arab Saudi dan Sudan; Laut Arab, terletak di bagian barat laut Samudera Hindia diantara Saudi Arabia dan India; Laut Mati, terletak di perbatasan Yordania dan Israel; Laut Kaspia berbatasan dengan Iran dan Laut Hitam terletak di Turki dan terakhir adalah Laut Aegean. Selain itu Timur Tengah juga memiliki lima selat strategis yang bernilai penting bagi perdagangan dunia, yaitu (1) Selat Gibraltar yang digunakan sebagai jalan pendek perjalanan kapal-kapal dari Samudera Atlantik (Eropa Amerika) ke Asia, terletak diantara Maroko dan Spanyol; (2) Selat Bab – Al Mandab terletak di pesisir Yaman, merupakan jalur yang digunakan kapal menuju Terusan Suez – Laut Merah- Samudera Hindia; (3) Selat Turki, digunakan sebagai tempat transit perdagangan dari Samudera Atlantik ke Asia. Selat Turki juga menjadi jalan satu – satunya jalur perdagangan Rusia dari Laut Hitam ke Laut Tengah; (4) Selat Hormuz, terletak di Iran sebelah utara dan Oman di sebelah selatan. Sangat strategis karena menjadi jalur semua kapal atau transportasi minyak dari dan ke Teluk Persia – Laut Arab – Samudera Hindia; (5) Terusan Suez, merupakan jalur vital bagi pelayaran dari Laut Tengah ke Afrika dan Asia.

Jalur Strategis ini menjadi motif bagi Arab Saudi didalam melakukan intervensi terhadap Yaman, karena jalur bab el mandeb yang ada di Yaman ini sangat berpengaruh terhadap jalur perdagangan Arab Saudi yang dimana dikarenakan setiap kapal yang berangkat

atau datang dari Arab Saudi akan melewati selat tersebut, maka dari itu menguasai jalur strategis merupakan hal yang utama dalam motif Arab Saudi untuk intervensi terhadap Yaman.

Bab El Mandeb sejak dulu merupakan pusat sejarah dan peradaban yang mampu mengendalikan atau menghentikan rute perdagangan terpendek antara Eropa, Afrika Utara, India, dan Asia Timur. Namun demikian, serangkaian peristiwa terkini di Yaman, termasuk dikuasainya sejumlah pelabuhan di pesisir Laut Merah oleh pemberontak Houthi, dan pengeboman Yaman oleh Arab Saudi yang dibantu Mesir membuat masa depan selat ini semakin suram. Menurut U.S. Energy Information Administration, sekitar 3,8 juta b/d minyak mentah dan minyak sulingan melintasi perairan Bab El-Mandeb pada tahun 2013. Karena itu, Bab El-Mandeb merupakan pos penting dalam rute perdagangan dunia.

Selat Bab El-Mandeb secara resmi terletak antara Yaman dan Djibouti, tetapi daerah di sekitar selat juga diduduki oleh Eritrea, Arab Saudi, dan republik semi-otonom Somaliland. Wilayah ini sudah lama menjadi pos dagang bagi pedagang yang berlayar antara Laut Mediterania dan Samudra Hindia. Penjelajah dan pedagang Mesir Kuno melewati selat ini untuk mencari kemenyan dari negeri Punt. Alexander Agung memerintahkan pasukan Yunani melintasi Laut Merah agar bisa mencapai Samudra Hindia. Bangsa Persia, Romawi, dan Arab memadati selat ini pada zaman dahulu. Sejak Terusan Suez dibuka tahun 1869 dan minyak mulai diperdagangkan lewat Laut Merah, bangsa Inggris, Perancis, Italia, Amerika Serikat, dan Soviet saling berebut kekuasaan di sana.

Pesatnya perkembangan wilayah pemberontak Houthi di Yaman Barat serta pendudukan ibu kota Yaman, Sana'a, pada bulan September menarik perhatian pemain-pemain regional besar yang berkepentingan menjaga stabilitas Yaman dan akses ke perairan Bab El-

Mandeb. Mesir merupakan salah satu pemain tersebut. Karena Mesir menguasai Terusan Suez, politikus Amr Moussa dikutip oleh surat kabar Al Ahram bahwa pemerintah Mesir memutuskan mendukung koalisi Arab pimpinan Saudi menyerang Houthi agar akses ke Laut Merah yang berujung di Terusan Suez tetap aman. Selain itu, dukungan keuangan yang sangat besar dari negara-negara Arab di Teluk Persia untuk Mesir pasca-Hosni Mubarak memaksa Mesir untuk menepati janjinya sebisa mungkin—kali ini berupa bantuan militer untuk koalisi anti-Houthi. Negara-negara ini sangat bergantung pada jargon “hentikan ekspansionisme Iran” sebagai alasan kampanye pengeboman terhadap “milisi yang didukung Iran”.

Gerakan Houthi—namanya diambil dari nama pendirinya, Hussein Al-Houthi—didirikan pada tahun 2004 di provinsi Saada, Yaman utara. Saada sejak dulu merupakan wilayah terbelakang yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Tidak adanya sarana penting seperti air dan listrik semakin memperkuat rasa keterasingan sekte Zaidi selaku penduduk mayoritas di sana. Gerakan Houthi awalnya didirikan untuk memperjuangkan hak-hak asasi kaum Zaidi (karena mereka tergolong minoritas di Yaman) serta menyediakan layanan pendidikan dan sosial di Saada.

Hussein Al-Houthi tewas pada tahun 2004 saat pasukan keamanan pemerintah Yaman hendak menangkapnya. Selama enam tahun berikutnya, pemberontak Houthi terlibat dalam perang sipil melawan pemerintahan di Sana'a. Setelah ayahnya meninggal tahun 2005, putra Al-Houthi, Abdel-Malek, memimpin gerakan ini dan merintis kampanye gerilya yang terpusat di pegunungan batu Saada. Konflik ini mengakibatkan ratusan ribu warga sipil kehilangan tempat tinggal. Konflik ini mulai reda setelah gencatan senjata tahun 2010.

Sejak Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mensponsori kesepakatan yang menggulingkan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dari tampuk kekuasaan dan menggantinya dengan mantan wakilnya, Abd Rabbu Mansour Hadi, pada awal 2012, Yaman belum merasakan kestabilan yang diharapkan dulunya. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk bercokolnya Al Qaeda di Yaman selatan, ekonomi yang bobrok, dan berbagai kelompok politik yang tidak puas dengan gagalnya Konferensi Dialog Nasional Yaman tahun 2013.

Banyak analis dan pengamat Yaman yang melihat campur tangan mantan presiden Saleh dalam cepatnya laju perkembangan Houthi. Sejumlah anggota keluarga dekat Saleh menempati posisi-posisi penting di militer Yaman dan partainya, Kongres Rakyat Umum. Dari rumahnya di Sana'a, Saleh—secara teknis keluar dari dunia politik dan diduga memiliki kekayaan miliaran dolar—masih rajin menemui kepala suku dan tokoh politik layaknya seolah-olah ia masih menjabat presiden. Sejak ia dipaksa menyerahkan kekuasaannya pada tahun 2012, Saleh mencoba menghambat transisi ke demokrasi yang dipimpin oleh mantan wakilnya, Hadi.

Ketika Houthi menduduki Sana'a tanpa perlawanan bulan September, jelas sekali bahwa Saleh memanfaatkan pengaruhnya di militer untuk mempersilakan mereka masuk dan menggulingkan Hadi dari kursi kepresidenan. "Ali Abdullah Saleh ingin memberantas lawannya agar ia bisa kembali menjadi pemimpin bangsa, dan Houthi dimanfaatkan sebagai jalan mencapai tujuan tersebut," kata Saeed al-Airi, anggota partai Islamis Yaman, al-Islah, kepada BBC.

Keberhasilan Houthi menembus pusat-pusat kota besar di Yaman sering dinilai sebagai efek pendanaan, pasokan senjata, atau pelatihan yang diberikan rekan sesektenya di Iran. Akan tetapi, tidak tepat bila konflik ini digambarkan sebagai perang proksi Sunni-Syiah

semata antara Arab Saudi dan Iran. Menurut Robert Worth, peneliti di wadah pemikir Wilson Center, anggapan adanya hubungan Iran terhadap urusan dalam negeri Yaman mulai muncul pada tahun 2009 melalui kampanye media yang berusaha menjelaskan kekalahan Saudi melawan gerakan baru ini. Militer Saudi menyerbu wilayah perbatasan Yaman utara yang dikuasai Houthi pada tahun 2009, dan senjata canggih mereka dilumpuhkan oleh milisi yang sederhana. Media Iran menggambarkan Houthi waktu itu sebagai pahlawan tangguh yang melawan pasukan penindas dari Arab Saudi, musuh bebuyutan Iran. Ini cuma gembar-gembor media tanpa bukti kuat adanya dukungan Iran untuk Houthi. Bahkan dokumen rahasia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dibocorkan Wikileaks meragukan kebenaran klaim keterlibatan Iran.

Dalam wawancara dengan kantor berita Al Monitor, seorang mantan diplomat Iran mengatakan bahwa Arab Saudi dengan sengaja melebih-lebihkan keterlibatan Iran dalam krisis Yaman karena Saudi hendak melawan pengaruh Iran yang semakin besar di negara lainnya di Timur Tengah. Mantan diplomat tersebut juga berkata, "Perkembangan terkini yang mungkin membuat Riyadh sangat tersinggung adalah pemulihan hubungan Amerika Serikat-Iran, dan Saudi merasa akan ditinggalkan oleh pelindungnya selama ini." Terkait peran Mesir dalam serangan terkini melawan Houthi, David Butter, peneliti di wadah pemikir Chatham House yang mendalami hubungan Mesir-Saudi, mengatakan, "Saya menafsirkan bahwa apabila Anda tidak mempertimbangkan kepentingan Saudi, apakah intervensi militer Mesir [dalam koalisi anti-Houthi] perlu dilakukan? Saya rasa tidak."

Walaupun sejumlah tokoh masyarakat Mesir mengklaim bahwa Mesir melibatkan diri dalam koalisi anti-Houthi demi melindungi akses ke selat Bab El Mandeb dan jalur kapal di Terusan Suez, Butter percaya bahwa

milisi Houthi bukan ancaman berarti bagi perdagangan di Laut Merah. “Apakah Houthi berencana menyerang kepentingan nasional Mesir di Terusan Suez?” Butter berpendapat sebaliknya. “Apabila benar, mereka tahu bahwa koalisi internasional akan diterjunkan untuk menghukum mereka.” Bahkan apabila para pemberontak Houthi sepenuhnya menguasai perairan Bab El-Mandeb yang masuk wilayah Yaman, Butter mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu menutup jalur perdagangan tersebut.

Ia menyinggung kekhawatiran dunia internasional ketika peluang Iran menutup Selat Hormuz akibat ketegangan antarnegara semakin besar. Walaupun demikian, Butter mengatakan bahwa “Iran memiliki militer yang lebih kuat (daripada Houthi Yaman), tetapi masih belum berencana menutup Selat Hormuz.” Butter berpendapat bahwa Arab Saudi, negara yang memandang Yaman sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan nasionalnya, tidak mampu mengendalikan politik dalam negeri Yaman lewat diplomasi dan manipulasi terhadap tokoh-tokoh adat Yaman. Ia menyebut bahwa mangkatnya pangeran pewaris takhta Arab Saudi, Sultan bin Abdulaziz, pada tahun 2011 diiringi oleh hilangnya kendali tersebut oleh Arab Saudi. Sultan bin Abdulaziz telah membina hubungan Arab Saudi-Yaman selama beberapa puluh tahun dan sangat paham perpolitikan suku di Yaman. “Bermain di balik layar akhir-akhir ini tidak ada hasilnya,” kata Butter. “Jadi Arab Saudi merasa perlu mengambil tindakan yang lebih mantap.”

Dari sudut pandang strategis, lalu lintas kapal tanker minyak dan gas dari Teluk melalui Selat Hormuz masih menjadi rute perdagangan energi terpenting di dunia. Energy Information Administration (EIA) juga melaporkan pada November 2014 bahwa rata-rata 167 juta barel minyak melewati Selat Hormuz per harinya. Selat Hormuz merupakan titik perdagangan minyak terpenting di dunia karena lalu lintas hariannya mencapai 17 juta barel per hari

pada tahun 2013. Tahun 2013, 30% minyak yang diangkut lewat laut di seluruh dunia melintasi Selat Hormuz.

EIA memperkirakan bahwa lebih dari 85% minyak mentah yang bergerak melintasi Selat Hormuz diimpor oleh negara-negara Asia, menurut data jasa pelacakan kapal tanker Lloyd's List Intelligence. Jepang, India, Korea Selatan, dan Cina adalah pengimpor utama minyak yang melintasi Selat Hormuz. Qatar mengeksport kurang lebih 3,7 triliun kaki kubik (Tcf) gas alam cair (LNG) per tahun lewat Selat Hormuz pada tahun 2013, menurut BP's Statistical Review of World Energy 2014. Volume tersebut mencakup lebih dari 30% perdagangan LNG dunia. Kuwait mengimpor LNG yang diangkut ke utara melintasi Selat Hormuz.

Di titik tersempitnya, lebar Selat Hormuz mencapai 21 mil, tetapi lebar jalur kapal di kedua arah hanya dua mil dan dipisahkan oleh zona pembatas selebar dua mil. Selat Hormuz cukup dalam dan lebar untuk dilayari oleh kapal tanker minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar sepertiga pengapalan minyak dilakukan oleh kapal tanker berbobot mati lebih dari 150.000 ton. Selat Hormuz dan Kelanjutan Ketergantungan Amerika Serikat Terhadap Ekspor Minyak yang Stabil

Tidak banyak jalur pipa yang menyediakan rute ekspor alternatif. Jalur-jalur pipa ini kapasitasnya terbatas. Beberapa di antaranya beroperasi dengan kapasitas terkini atau terkena ancaman militer. EIA melaporkan pada November 2014 bahwa:

Opsi-opsi alternatif selain Hormuz saat ini tidak beroperasi. Hanya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) yang memiliki jalur pipa untuk menyalurkan minyak mentah dari Teluk Persia dan jalur pipa untuk menghindari Selat Hormuz. Pada akhir 2013, total kapasitas pipa yang tidak dimanfaatkan dari kedua negara tersebut kurang lebih 4,3 juta bbl/d.

Arab Saudi memiliki Petroline sepanjang 746 mil, dikenal juga dengan nama East-West Pipeline, yang membentang melintasi Arab Saudi dari kompleks Abqaiq ke Laut Merah. Sistem Petroline terdiri dari dua jalur pipa dengan kapasitas maksimum 4,8 juta bbl/d. Jalur pipa sebesar 56 inci berkapasitas 3 juta bbl/d, dan saat ini mampu mengangkut sekitar 2 juta bbl/d. Jalur pipa sebesar 48 inci telah beroperasi dalam beberapa tahun terakhir sebagai pipa gas alam, lalu dialihfungsikan menjadi pipa minyak oleh Arab Saudi. Alih fungsi ini meningkatkan kapasitas pipa minyak sisa Arab Saudi untuk menghindari Selat Hormuz dari 1 juta bbl/d ke 2,8 juta bbl/d, tetapi ini baru dapat dicapai apabila sistem tersebut beroperasi dengan kapasitas maksimum.

Arab Saudi juga mengoperasikan jalur pipa gas alam cair Abqaiq-Yanbu dengan kapasitas 290.000 bbl/d. Akan tetapi, pipa ini sekarang beroperasi dengan kapasitas penuh dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi pipa minyak.

UEA mengoperasikan Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (1,5 juta bbl/d) yang membentang dari Habshan, titik kumpul ladang minyak darat Abu Dhabi, hingga pelabuhan Fujairah di pesisir Teluk Oman. Pipa ini memungkinkan minyak mentah disalurkan tanpa melewati Selat Hormuz. Jalur pipa ini mampu menyalurkan lebih dari separuh total ekspor bersih minyak UEA. Pemerintah berencana meningkatkan kapasitasnya hingga 1,8 juta bbl/d. Jalur pipa lainnya saat ini tidak dapat dijadikan opsi alternatif Selat Hormuz. Arab Saudi juga memiliki dua jalur pipa tambahan yang membentang paralel dengan sistem Petroline dan menghindari Selat Hormuz, tetapi tidak ada yang mampu menyalurkan volume minyak tambahan apabila Selat Hormuz ditutup sewaktu-waktu.

Iraqi Pipeline in Saudi Arabia (IPSA) sebesar 48 inci dengan kapasitas 1,65 juta bbl/d yang membentang paralel dengan Petroline dari SPBU #3 (terdapat

11 SPBU di sepanjang Petroline) ke pelabuhan Mu'ajiz, tepat di selatan Yanbu, Arab Saudi, dibangun tahun 1989 untuk mengangkut 1,65 juta bbl/d minyak mentah dari Irak ke Laut Merah. Jalur pipa ini ditutup permanen pasca-invasi Irak ke Kuwait bulan Agustus 1990. Pada Juni 2001, Arab Saudi mengambil alih kepemilikan IPSA dan mengubahnya menjadi pipa gas alam ke pembangkit listrik. Arab Saudi belum berencana mengembalikan fungsi pipa tersebut menjadi pipa minyak mentah.

Jalur pipa lainnya, seperti Trans-Arabian Pipeline (TAPLINE) dari Qaisumah di Arab Saudi ke Sidon di Lebanon, atau jalur pipa minyak strategis antara Irak dan Turki, tidak digunakan selama bertahun-tahun akibat kerusakan perang, jarang digunakan, atau perselisihan politik. Jalur-jalur pipa tersebut perlu diperbaiki besar-besaran sebelum digunakan untuk menyalurkan minyak. Minyak dalam jumlah kecil, paling tidak beberapa ratus ribu barel per hari, dapat diangkut menggunakan truk apabila Selat Hormuz ditutup.

Ekspor minyak ini memainkan peran penting dalam pemasokan energi ke negara-negara berekonomi besar seperti Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan serta membatasi harga minyak, gas, dan produk minyak bumi global. Ekspor minyak juga memengaruhi harga minyak dan produk minyak bumi global menurut asalnya. Ekspor minyak berdampak pada ekonomi global karena setiap bisnis dan pekerjaan di Amerika Serikat perlahan semakin bergantung pada arus impor dan ekspor. Sekitar 15,2 juta barel minyak per hari dari 17 juta barel minyak per hari diangkut dari Selat Hormuz melintasi Selat Malaka untuk menopang ekonomi Amerika Serikat; sisanya diekspor ke India.

Amerika Serikat telah mengurangi ketergantungannya terhadap impor minyak bumi langsung secara drastis, namun EIA melaporkan pada awal 2015 bahwa Amerika Serikat masih mengimpor 27% minyak bumi

yang dikonsumsi tahun 2014. Annual Energy Outlook masih memperkirakan bahwa Amerika Serikat masih akan tergantung pada impor sebagian bahan bakar cairnya, penggerak sektor transportasinya, sampai tahun 2040. Ketergantungan pada impor minyak akan naik hingga 32% menjelang tahun 2040.

Perhitungan ini belum pasti dan masih bisa berubah seiring waktu. Hal yang pasti adalah berkurangnya impor langsung oleh Amerika Serikat tidak memengaruhi tumbuhnya ketergantungan ekonomi Amerika Serikat terhadap kestabilan ekonomi global serta barang impor dan barang jadi Amerika Serikat. Perkiraan ketergantungan ini bervariasi menurut pemerintah Amerika Serikat sendiri, tetapi laporan CIA bulan Maret 2015 mengindikasikan bahwa total impor Amerika Serikat mencapai \$2,273 triliun pada tahun 2013.

Total impor ini setara dengan 13,6% total PDB sebesar \$16,72 triliun. Hanya 8,2% barang impor berupa minyak bumi. 86,9% lainnya adalah barang pabrikan, dan sedikitnya 35% berasal dari negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang bergantung pada impor minyak dari Teluk Persia. Ketergantungan tak langsung Amerika Serikat terhadap barang impor merugikan ekonominya senilai \$690 miliar, berbeda dengan impor minyak mentah yang memakan \$186 miliar. Sesuai dengan yang ada pada bab pendahuluan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, Motif Arab Saudi melakukan intervensi terhadap konflik di Yaman adalah sebagai berikut ; Pertama, menguasai jalur strategis selat bab el mandeb sebagai jalur strategis lalu lintas minyak Arab Saudi ke samudera hindia dan internasional. Kedua, Intervensi agar pemerintahan yang dikuasai oleh Islam Sunni tidak jatuh ke pemberontak Huthi yang berkeyakinan Syiah. Hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan kerangka pemikiran yang mengaitkan kondisi suatu Kepentingan

Nasional suatu negara mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Selat Bab el-Mandeb adalah alur pelayaran antara Tanjung Afrika dan Timur Tengah. Selat ini juga merupakan penghubung strategis antara Laut Mediterania dan Samudra Hindia. Selat ini terletak antara Yaman, Djibouti, dan Eritrea serta menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Laut Arab. Sebagian besar ekspor dari Teluk Persia yang transit di Terusan Suez dan Pipa SUMED juga melintasi Bab el-Mandeb.

Kurang lebih 3,8 juta bbl/d minyak mentah dan produk minyak sulingan melewati perairan ini pada tahun 2013 dengan tujuan Eropa, Amerika Serikat, dan Asia, naik dari 2,9 juta bbl/d tahun 2009. Minyak yang diangkut melintasi selat ini berkurang hampir sepertiganya pada tahun 2009 karena krisis ekonomi global dan menurunnya ekspor minyak ke Eropa. Pengapalan minyak ke utara lewat Selat Bab el-Mandeb meningkat pada tahun 2013. Lebih dari separuh lalu lintas minyak, sekitar 2,1 juta bbl/d, bergerak ke utara ke Terusan Suez dan Pipa SUMED. Selat Bab el-Mandeb hanya selebar 18 mil di titik tersempitnya. Kapal tanker terpaksa melewati dua jalur selebar dua mil untuk pelayaran keluar-masuk Teluk Persia. Penutupan Bab el-Mandeb membuat kapal-kapal tanker dari Teluk Persia tidak bisa mencapai Terusan Suez atau Pipa SUMED dan memaksa mereka berputar mengelilingi ujung selatan Afrika sehingga menambah waktu dan biaya transit. Selain itu, perdagangan minyak ke selatan dari Eropa dan Afrika Utara tidak dapat memanfaatkan rute paling singkat ke Asia via Terusan Suez dan Bab el-Mandeb.

Maka dari itu di sini bisa kita lihat mengapa Bab el Mandeb menjadi strategis dimana selat tersebut mempermudah rute perdagangan dan dapat mempercepat waktu serta memotong biaya perjalanan dengan mengambil rute terpendek untuk mencapai terusan suez. Riyadh khawatir

bahwa kebangkitan Houthi akan menginspirasi minoritas Zaydi dan Syiah di negaranya. Doha berperan sebagai mediator dalam konflik ini. Pada tahun 2007, emir Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, mengunjungi Yaman dan mengutus delegasi Qatar ke Sa'dah untuk merundingkan gencatan senjata, menawarkan dana \$500 juta untuk rekonstruksi provinsi dengan imbalan pelucutan senjata Houthi. Perjanjian gencatan senjata (dikenal sebagai perjanjian Doha) antara pemerintah Yaman dan Houthi ditandatangani di ibu kota Qatar pada Februari 2008. Ketika gencatan senjata gagal, Qatar kembali mengutus pejabatnya untuk mencoba mengakhiri konflik selanjutnya, termasuk perang keenam yang melibatkan Arab Saudi. Sejak Musim Semi Arab Yaman, ketika Saleh mengusir duta besar Qatar untuk Yaman dan menuduh Doha mendukung militer, suku, dan kelompok politik Islamis untuk menggulingkannya, peran Qatar di Yaman semakin jauh berbeda dibandingkan dengan Arab Saudi. Doha bukan penandatangan 'kesepakatan GCC' yang menyatakan bahwa Saleh setuju untuk mundur karena Qatar diminta untuk tidak terlibat dalam perundingan. Sejak 2013, pemerintah Qatar disampingkan di Sana'a, sedangkan Arab Saudi berupaya memarginalkan kelompok Sunni yang sama, yang juga dipandang secara negatif seperti Ikhwanul Muslimin di kawasan Arab, yang kabarnya didukung Doha pada tahun 2011 (klaim dukungan Qatar selalu menjadi sumber ketegangan).

Dalam rangka kembali ke akar 'kekuasaan lembut'-nya, Qatar menawarkan jutaan dolar untuk membantu ganti rugi untuk mantan pejabat sipil di selatan demi meredakan ketegangan di selatan Yaman. Posisi yang diambil setiap negara GCC saat pengepungan Sana'a oleh Houthi masih belum jelas. Sejumlah wartawan regional melaporkan bahwa UEA mendukung Saleh setelah konflik tersebut. Mantan presiden tersebut kabarnya membantu masuknya Houthi ke ibu kota Yaman sebagai bagian dari manuver untuk

melemahkan kaum Sunni konservatif, musuh politik terbesarnya yang juga dipandang sebagai ancaman eksistensial oleh Arab Saudi dan UEA. Sumber-sumber diplomatik di Sana'a mengatakan bahwa apabila memang demikian adanya - dan tidak banyak yang percaya - tidak mungkin Abu Dhabi mengambil tindakan tanpa sepengetahuan Riyadh. Baik UEA dan Arab Saudi membantah keterlibatan mereka, dan tampaknya apabila mereka awalnya mendukung Saleh dan Houthi, mereka langsung memutarbalikkan posisinya. Sejak pendudukan oleh Houthi, kebangkitan kelompok ini memberi serangkaian tantangan kebijakan kompleks bagi negara-negara Barat dan GCC, terutama Amerika Serikat dan Arab Saudi. Setelah menduduki ibu kota, Houthi mulai berfokus pada provinsi Al Baydah di yaman tengah. Provinsi ini dikenal sebagai sumber utama dukungan untuk AQAP.

Sebelum munculnya Negara Islam, provinsi ini dicap Washington sebagai cabang Al-Qaeda paling mematikan di Timur Tengah. Houthi juga berkali-kali mendukung rencana untuk mengubah status quo historis Yaman dan mendorong perumusan konstitusi baru dan pemilihan demokratis sehingga sesuai dengan tujuan kedutaan-kedutaan Barat di Sana'a. Upaya untuk menghambat kelompok ini akan memperparah kekosongan kekuasaan yang sangat parah di Yaman utara, meredakan ketegangan agar transisi segera selesai dan memberi kesempatan bagi AQAP. Pada awal 2015, negara ini menghadapi krisis fiskal yang parah yang hanya bisa dihindari melalui arus dana dari Saudi. Riyadh tidak mau menanggung negara yang dipandang sebagai sandera kelompok Syiah militan, tetapi sadar bahwa krisis ekonomi yang memburuk akan memicu gelombang migrasi ekonomi yang tidak diinginkan ke utara. Para pendukung Houthi mengakui bahwa Yaman butuh dukungan keuangan luar untuk menghindari krisis ekonomi. 'Kami tahu kami butuh utang agar

pemerintahan bisa berjalan dan mendanai berbagai hal,' kata seorang aktivis pro-Houthi yang dekat dengan petinggi kelompok tersebut. 'Kami tidak bisa berbuat seenaknya dan menyingkirkan orang lain.' Sulitnya tindakan penyeimbangan ini terlihat jelas pada awal November 2014 ketika Amerika Serikat, atas dorongan GCC, terutama Arab Saudi, mempetisi DK PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap Saleh dan dua komandan lapangan Houthi utama. Sanksi tersebut disetujui oleh DK PBB pada tanggal 7 November.

Daftar target sanksi sebelumnya yang dibocorkan ke Al Jazeera (dan dibenarkan oleh diplomat di Sana'a) mencakup Abdelmalek al-Houthi, namun dari sini dapat diketahui bahwa pemimpin kelompok dihapus dari daftar karena Riyadh dan Washington menyadari kenyataan bahwa mereka mungkin perlu bekerja sama dengan Houthi di masa depan. Kerja sama ini tidak mungkin semudah kerja sama sebelumnya. Aktivis pro-Houthi tersebut juga berkomentar bahwa meski kelompok tersebut menyadari perlunya membina hubungan dengan negara-negara besar, kebijakan luar negeri Yaman bisa jadi cenderung sejalan dengan Iran karena kelompok ini semakin berpengaruh dalam pemerintahan. Terkait hal ini, ia menyatakan bahwa pemerintah akan terus berfokus pada pemberantasan gerakan-gerakan ekstremis Sunni seperti AQAP dan IS dan mendukung solusi bagi isu Israel dan Palestina secara agresif. Kebijakan pertama sejalan dengan kepentingan Saudi dan AS, sedangkan kebijakan terakhir sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Saudi dan Iran.

Kemungkinan Yaman sejalan dengan kebijakan luar negeri Iran akan membuat Arab Saudi khawatir bahwa Houthi akan menjadi ancaman langsung bagi kepentingannya sendiri dan bahkan wilayahnya. Namun demikian, hal ini semakin jauh dari kenyataan. Sejak awal 2015, Houthi mengambil sikap yang sangat agresif terhadap intervensi asing dan sering menyalahkan aktor luar

negeri dan 'boneka' pemerintah Yaman atas persoalan keamanan dan ekonomi Yaman. Peristiwa Januari 2015, ketika Houthi menguasai istana kepresidenan dan kediaman Abd Rabbu Mansour Hadi di Sana'a dan markas dua organisasi intelijen utama Yaman sebelum menuntut kekuasaan politik yang lebih luas, menunjukkan bahwa sanksi tidak cukup untuk menghambat kebangkitan Houhti. Belum jelas pula apa keuntungan yang dimiliki komunitas internasional atas gerakan ini. Kesimpulan. Sekilas, Yaman sepertinya akan menjadi negara yang persaingan dalam negerinya mudah terombang-ambing oleh ketegangan Iran-Saudi. Akan tetapi, persiapan dalam negeri ini merupakan permasalahan setempat, bukan konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran. Ekspansi Houthi baru-baru ini hanyalah cerminan persekutuan baru dengan sosok yang tidak disangka-sangka: mantan presiden Saleh sejatinya adalah sekularis nasionalis dan dari dulu merupakan musuh Houthi, namun sekarang bersekutu untuk melawan musuh bersama. Ekspansi Houthi ke provinsi-provinsi di selatan Sana'a sejak pendudukannya serta sikap Houthi yang semakin agresif di Sana'a menunjukkan bahwa kapasitas risiko mereka masih kuat dan, menurut dugaan banyak pihak, mereka didorong oleh kepercayaan diri berlebihan karena melihat mudahnya merebut ibu kota.

Penduduk di selatan khawatir kelompok tersebut akan menyebar ke selatan hingga Aden; Houthi kabarnya mulai menguat di Aden. Kemajuan mereka bisa jadi dihambat oleh AQAP yang justru mendapat banyak dukungan sejak pendudukan oleh Houthi. Hal ini menunjukkan ketakutan di kalangan Sunni bahwa Houthi berencana menerapkan doktrin agama di Yaman setelah mewujudkan ambisi teritorialnya. Belum jelas apakah kelompok ini masih akan memperbesar dirinya atau, apabila terbukti berhasil menguasai Yaman, apakah mereka mampu mempertahankan posisinya. Belum jelas pula bagaimana GCC, khususnya Arab Saudi, akan bereaksi

terhadap ekspansi teritorial Houthi dan meningkatnya marginalisasi lembaga transisi. Kedua belah pihak tampaknya mau mengecilkan suaranya supaya bisa bekerja sama, tetapi Saudi khawatir bahwa, apabila Houthi menguasai Yaman dalam jangka panjang, target mereka beralih ke Saudi dengan atau tanpa dukungan Iran. Pada akhirnya, apabila Yaman mau stabil kembali dan utuh secara geografis, sebuah kesepakatan yang memuaskan kebutuhan para pemain dalam negeri perlu dicapai sambil mengamankan dukungan pelindung negara ini.

Daftar Pustaka

- [1] Black, A. James & Champion, J. Dean. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Eresco, 1992.
- [2] Boucher, D. *Political Theories of International Relations*. 2th ed. United States: Oxford University Press, 1998.
- [3] Clayton, Anthony. *Frontiersmen: Warfare in Africa Since 1950*. London: University College London Press, 1999.
- [4] Clinton, W. David (1986) "The National Interest : Normative Foundations" *The Review of Politics*, Vol.48, No.4: pp.495-519
- [5] Hironaka, Ann. *Neverending Wars : the International Community, Weak States, and the Perpetuation of Civil War*. Massachusetts: University Harvard Press, 2005.
- [6] "Yemen Humanitarian Bulletin No 1 – 27 August 2015". UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 27 August 2015. Archived from the original on 28 August 2015. ("PDF" (PDF). Archived from the original on 28 August 2015.)
- [7] Rubin, Alissa J.; Fahim, Kareem (8 May 2015). "Saudi Arabia Announces Cease-Fire in Yemen". *New York Times*.
- [8] "The war in Yemen: From Aden to Camp David". *The Economist*. 14 May 2015. Retrieved 18 May 2015.
- [9] "Yemen: Saudi Arabia Readies for Major Attack, Drops Leaflets Asking Citizens to Flee". *International Business Times*. 8 May 2015. Retrieved 11 May 2015.
- [10] "Yemen conflict: UN criticises Saudi civilian bombings". *BBC News*. Retrieved 11 May 2015.
- [11] Fitch, Asa; al-Kibsi, Mohammed (10 May 2015). "Yemen's Houthi Rebels Accept Five-Day Truce Proposal". *The Wall Street Journal*. Retrieved 10 May 2015.
- [12] "Yemen conflict: Aid effort begins as truce takes hold". *BBC*. 13 May 2015.
- [13] "Saudi king doubles Yemen aid pledge to \$540 mn". *AFP*. 13 May 2015.
- [14] "Saudi-led coalition ends military operation in Yemen".
- [15] "Yemen conflict: Saudis launch new air strikes on rebels". *BBC*. 23 April 2015.
- [16] Chappell, Bill (22 April 2015). "Saudi Arabia Shifts Military Campaign In Yemen; Airstrikes Continue". *National Public Radio*. Retrieved 22 April 2015.
- [17] Black, Ian (22 April 2015). "Yemen crisis: air strike hits Aden after Saudi Arabia ends bombing campaign". *The Guardian*. Retrieved 22 April 2015.
- [18] "Saudi-led coalition launches air strikes throughout Yemen: residents". *Reuters*. 23 April 2015. Retrieved 23 April 2015.
- [19] "Houthis call for peace talks as Saudi planes strike Yemen". *CNN*. 22 April 2015. Retrieved 22 April 2015.
- [20] "Air raids and ground clashes rage in Yemen". *Al Jazeera*. 26 April 2015.
- [21] "Fighting escalates across Yemen, air strikes on capital Sanaa". *Reuters*. 26 April 2015.
- [22] "Saudi air raids strike Yemeni capital". *AFP. MediaWorks TV*. 27 Apr 2015. Retrieved 27 April 2015.
- [23] "Air raids and ground clashes rage in Yemen". *Al Jazeera*. 26 April 2015. Retrieved 26 April 2015.
- [24] "First Saudi National Guards reach Yemen border zone". *AFP. Ahram Online*. 27 Apr 2015. Retrieved 27 April 2015.
- [25] Al-Haj, Ahmed (29 April 2015). "Yemen Rebels and Allies Advance in Southern City of Aden". *ABC News*. Retrieved 29 April 2015.
- [26] "Yemen airport bombed". *Reuters*. 29 April 2015. Retrieved 29 April 2015.
- [27] "Aid flights to Yemen blocked after Saudi Arabian jets bomb airport runway". *Reuters*. 29 April 2015. Retrieved 30 April 2015.
- [28] "Farsnews". Retrieved 13 July 2015.
- [29] "PressTV-Saudi planes bomb Sana'a intl. airport". Retrieved 13 July 2015.

Melalui penjelasan koreasional di atas, dapat disimpulkan bahwa motif intervensi Arab Saudi terhadap Yaman adalah pertama, ingin menguasai jalur strategis Bab el Mandeb, dan kedua ialah karena Arab Saudi tidak ingin Yaman jatuh pada pengaruh syiah yang dimana berujung kepada proxy war yang telah terjadi antara Arab Saudi dan Iran. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini terbukti sepenuhnya karena ada kesesuaian antara hipotesis dengan hasil akhir penelitian.

- [30] "Iranian Parliament Condemns Saudi Arabia for Blocking Humanitarian Aid to Yemen – ghatreh". ghatreh. Retrieved 18 May 2015.
- [31] "Iran Summons Saudi Envoy Over Blocking Humanitarian Aid to Yemen". kayhan.ir. Retrieved 18 May 2015.
- [32] "Farsnews". farsnews.com. Retrieved 18 May 2015.
- [33] "UN urges Saudi-led coalition to stop targeting Yemen airport". Reuters. 4 May 2015. Retrieved 13 July 2015.
- [34] "Humanitarian flights unable to land, after bombing Sana'a International Airport". Yemen Times.
- [35] "Yemen: Reduced Imports Worsen Crisis (as of 23 June 2015)". UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 23 June 2015. Archived from the original on 24 June 2015.; PDF: "Yemen: Reduced Imports Worsen Crisis (as of 23 June 2015)"
- [36] "Yemen: Coalition Blocking Desperately Needed Fuel – Tankers Wait Offshore as Civilians Go Without Water, Electricity". Human Rights Watch. 2015-05-11. Archived from the original on 2015-05-11.
- [37] Kasinof, Laura. "How Yemen's Civil Conflict Turned Into a Regional Proxy War". The Nation.